

## Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Penertiban Angkutan Kota

Viona Putri Hasmiwati<sup>1</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received 21 September 2022

Publish 15 November 2022

---

#### Keywords:

Implementation, Controlling  
Ordering, Urban Transportation

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received 21 September 2022

Publish 15 November 2022

---

### Abstract

*This study aims to determine and describe how the implementation of the supervisory function by the Padang Urban Transportation Service when controlling city transportation. This study uses a descriptive qualitative method, the selection of informants is done by purposive sampling technique. The validity of the data was tested by source triangulation technique and then analyzed by the researcher. The results of this study refer to the theory of George C. Edward said four policy implementations and George R. Terry and Leslie W. Rue for monitoring indicators. However, in carrying out its implementation, it is said to be not optimal because there are still deficiencies that occur in monitoring activities when controlling urban transportation. The cause of the non-optimal application of these indicators is that there are still city transportation that try to escape because there is no strict isolation at that location. The number of members sent to the field is still lacking. Supervision activities were carried out but only asked questions and did not see evidence of the KIR test letter. The work to carry out supervision at the time of supervision is left unattended, supervision activities at the time of controlling city transportation need to be carried out because it affects the roadworthiness of vehicles. It turns out that the implementation of the monitoring functions of the Padang City Transport Service for controlling urban traffic is not optimally.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang saat melakukan penertiban angkutan kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dalam pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Untuk keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini mengacu kepada teori *George C. Edward* mengatakan empat implementasi kebijakan dan *George R. Terry dan Leslie W. Rue* untuk indikator pengawasan. Tetapi dalam melakukan pelaksanaannya dikatakan belum optimal karena masih adanya kekurangan yang terjadi pada kegiatan pengawasan saat penertiban angkutan kota. Penyebab belum optimalnya penerapan indikator-indikator tersebut adalah masih ada angkutan kota yang berusaha melarikan diri karena tidak adanya isolasi yang ketat di lokasi tersebut. Jumlah anggota yang dikirim ke lapangan masih kurang. Kegiatan pengawasan dilakukan tetapi hanya bertanya dan tidak melihat bukti surat uji KIR. Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pada saat pengawasan dibiarkan begitu saja, kegiatan pengawasan pada saat penertiban angkutan kota perlu dilakukan karena mempengaruhi kelangkaan jalan kendaraan. Maka disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang saat melakukan penertiban angkutan kota belum berjalan optimal.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Viona Putri Hasmiwati

Universitas Negeri Padang

Email: [hasmiwatiputriviona@gmail.com](mailto:hasmiwatiputriviona@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Transportasi digunakan sebagai alat untuk menunjang kehidupan masyarakat, menjaga hubungan antar manusia, dan mempermudah masyarakat dalam melakukan perpindahan alat maupun barang ke tempat yang dituju (Fatimah, 2019). Transportasi adalah peralatan dalam berpindah dari satu titik lokasi ke lokasi yang lain dan menjadi kebutuhan dalam hidup mereka dan harus dipenuhi (Frinaldi, et al, 2020).

Transportasi yang didukung tertib, lancar, aman, dan nyaman dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan dijadikan sebagai pilihan dan tujuan yang baik untuk pemerintah. Dilihat dari pentingnya peran transportasi, dengan hal itu pemerintah daerah harus mengatur lalu lintas dan transportasi jalan menuju terciptanya ketertiban lalu lintas. Kota Padang kini menjadi salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, dimana jumlah penduduknya semakin meningkat maka kebutuhan akan transportasi umum yang digunakan juga semakin meningkat, dalam hal itu sebagian besar masyarakat Kota Padang masih memerlukan dan menggunakan jasa transportasi umum sebagai sarana transportasi, seperti seperti melakukan aktivitas sehari-hari.

Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan terdapat pada Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Padang dengan Dinas Pengatur Lalu Lintas bertugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan lalu lintas kepada seluruh unit organisasi angkutan dalam kaitannya dengan pengelolaan sarana/prasarana angkutan maupun infrastruktur pengawasan angkutan.

Transportasi sebagai elemen penting dalam faktor perkembangan suatu negara (Frinaldi, 2016). Angkutan perkotaan ini, sebagai angkutan umum dari suatu tempat menuju tempat lokasi yang lain disediakan secara kolektif oleh masyarakat, terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai di kawasan tersebut (Buamona, 2017).

Dalam kegiatan transportasi tentunya banyak faktor yang mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang baik. Peran transportasi perkotaan di kawasan perkotaan diharapkan mampu mewartakan segala aktivitas masyarakat. Namun fungsi dan peran transportasi menimbulkan masalah yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Dinas Perhubungan Kota Padang yang memberikan perhatian untuk transportasi perkotaan yang baik dan layak bagi masyarakat.

Angkutan kota dijalankan sesuai dengan jalur atau rutenya masing-masing dan masih menjadi fokus pada masyarakat yang belum memiliki kendaraan pribadi mereka (Alexandri, 2019). Angkutan kota menjadi fenomena yang bisa dikaitkan dengan Dinas Perhubungan Kota Padang. Dalam penanganan angkutan kota ternyata terdapat berbagai permasalahan. Jumlah angkutan kota di Kota Padang dapat dilihat pada tabel, ialah:

**Tabel 1.1 Jumlah Angkutan Kota Menurut Trayek dan Jenis Kendaraan, 2021**

No	Rute Trayek	Kode Trayek	Jumlah
1.	Pasar Raya - Bandar Buat - Ulu Gadut	307	82
2.	Pasar Raya - Arai - Perum Pegambiran Via Lubeg	407A	93
<b>3.</b>	<b>Pasar Raya - Lubuk Buaya - Batas Kota</b>	<b>419</b>	<b>314</b>
4.	Pasar Raya - Perum Belimbing Via Simpang Ketaping	430	72
5.	Pasar Raya - Teluk Bayur (Seberang Padang)	433	102
6.	Pasar Raya - Kampus Unand Limau Manis	448	96
7.	Pasar Raya - Aia Pacah Via Ampang	440	33

*Sumber: BPS, Kota Padang dalam angka 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah angkutan kota pada trayek Pasar Raya – Lubuk Buaya – batas kota Padang dengan kode trayek 419 merupakan yang terbanyak diantara trayek angkutan kota lainnya. Selain itu, berdasarkan wawancara awal, peneliti juga menemukan kode trayek 419 yang paling banyak melakukan pelanggaran. Dengan data yang didapat peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian ini hanya pada kode trayek 419.

Saat ini permasalahan yang terjadi terkait Implementasi Fungsi Pengawasan dalam penertiban angkutan kota yang terlihat dari kurang memadai petugas operasional. masih kurang pembenahan sarana dan prasarana yang mengakibatkan penataan transportasi kota kurang baik. Masih kurang pengawasan untuk pengemudi angkutan perkotaan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan masih banyak yang tidak patuh lalu lintas yang ada. Belum memenuhi tercapainya standar dan tujuan dalam pengujian KIR untuk memastikan kelayakan suatu kendaraan atau komoditas di jalan.

Penelitian ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan untuk melakukan peningkatan terhadap implementasi fungsi pengawasan dinas perhubungan kota padang saat penertiban angkutan kota. Dengan itu hambatan yang terjadi dilapangan terkait implementasi fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dan penertiban angkutan kota ini dilakukan secara optimal dan diminimalisir hambatan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang bersifat deskriptif. Paparan dari Bogdan dan Taylor (dalam Ahmadi, 2014: 15) metode kualitatif ialah proses maupun alur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berisi ucapan dan tulisan dan perilaku yang diamati dari suatu subjek yang akan diteliti. Dengan sumber data dan informasi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen- dokumen yang mendukung.

Dalam menetapkan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan peneliti yaitu Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional, Kepala Seksi Manajemen Angkutan, Kepala Seksi Prasarana Angkutan, Kepala Penegakan Hukum dan Kepala UPTD. Terminal Angkutan Kota.

Selanjutnya keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dengan informan triangulasi yaitu dari pihak Kepolisian Resor Kota Padang dan beberapa Supir Angkutan Kota Padang dengan Trayek 419. Untuk mengecek sesuai atau tidak informasi yang didapatkan oleh informan utama penelitian, sehingga didapatkan dengan baik dalam proses analisa data.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Impelementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota

Implementasi dari Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan penertiban angkutan kota tentunya masih ditemukan berbagai permasalahan saat ini, untuk meminimalisir terjadi permasalahan tersebut maka dilakukan pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini memfokuskan implementasi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Yang di dalamnya berisi semua aturan/ kebijakan saat pelaksanaan kegiatan. Pasal 48 di dalam UU No. 22 Tahun 2009 itu menyebutkan tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Selanjutnya sanksi administratif terdapat di dalam UU No.22 Tahun 2009 pada pasal 76 yang setiap pelanggaran dapat berupa: peringatan tertulis, peringatan denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Dilanjut ke pasal 77 tentang Surat Izin Mengemudi yang berkaitan saat melakukan pembawaan kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi. Untuk Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkhususnya bidang per bidangnya diatur di Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Yang akan disesuaikan masing- masing tugas dan fungsinya sesuai bidang yang peneliti lakukan pada skripsi ini.

Untuk segi penertiban angkutan kota dalam patuh berlalu lintas terdapat di dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 105 tentang ketertiban dan keselamatan. Yang menjelaskan Pengguna jalan harus berperilaku baik dan menghindari segala sesuatu yang dapat menghambat atau membahayakan lalu lintas atau menyebabkan kerusakan jalan.

Hasil dari penelitian ini menggunakan indikator implementasi dan pengawasan. Dalam hal itu, penelitian menggunakan indikator teori *George C. Edward* dalam Mulyadi (2016:68) memberikan empat implementasi kebijakan.

1. Implementasi

a. Komunikasi

Implementasi menurut *George C. Edward* (2016) dikatakan berhasil ketika mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Adapun komunikasi, di dalam kebijakan dilaksanakan apabila dilakukannya komunikasi yang efektif dengan pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang akan dicapai (Indiahono, 2009).

Yang didapat bahwa Dari Komunikasi yang terjalin saat melakukan pelaksanaan pengawasan saat penertiban angkutan kota ini sudah terbilang cukup baik. Dalam hal adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan. Komunikasi yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan. Pandangan dari informan triangulasi lebih kurang sama dengan paadangan dari pihak Dinas Perhubungan sendiri.

b. Sumberdaya

Menurut *George C. Edward* (2016) Sumber daya manusia itu sendiri dilihat dalam kecukupan kualitas dalam mencukupi seluruh kelompok sasaran yang dituju. Dengan sumber daya itu menjadi peranan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk Sumberdaya pada saat melakukan pelaksanaan implementasi pengawasan penertiban angkutan kota masih terbilang kurang sehingga masih menyebabkan masalah di lapangan.

Yang di dapat dari hasil wawancara yaitu terjadi angkutan yang mencoba kabur karena tidak ada penyekatan yang ketat di lokasi. Anggota yang diturunkan ke lapangan ini masih terbilang belum cukup banyak. Sarana dan prasarana yang digunakan hanya menggunakan rambu lalu lintas dan plang razia saja, lalu menggunakan mobil derek untuk pengangkutan angkutan kota yang melanggar. Dengan hal itu SAPRAS yang digunakan baik tetapi belum optimal.

c. Disposisi

Disposisi ini sebagai respon implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan mendorong kebijakan tersebut. Disposisi ini *George C. Edward* (2016) juga berkaitan dengan bagaimana konsisten kegiatan tersebut dijalankan atau tidak.

Saat melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan kota dikatakan tidak sesuai dengan hasil wawancara karena masih ada kegiatan lain yang dilakukan, terkadang kegiatan yang lakukan ini tiba-tiba tidak terjadi. Hal itu membuat pekerjaan untuk melakukan pengawasan dibiarkan begitu saja, seharusnya kegiatan ini dilakukan karena mempengaruhi kelaikan jalan kendaraan.

Terdapat perbedaan jawaban antar pengemudi angkutan kota yang menjadi objek penelitian ini. Dimana jawaban dari sopir angkutan kota dianggap sudah diawasi tetapi hanya bertanya dan tidak melihat bukti surat uji KIR dan terdapat jawaban tidak sering dilakukannya kegiatan tersebut. Dengan demikian menurut jawaban informan triangulasi disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan kota padang belum optimal.

d. Struktur Birokrasi

Aspek birokrasi suatu organisasi menjadi penting karena setiap organisasi memiliki *standar operasional prosedur* (*George C. Edward*: 2016). Dalam penelitian ini didapatkan bahwa SOP yang mengatur tidak ada tertulis dan penyelesaian dari angkutan kota yang melanggar hanya diselesaikan oleh Pihak Kepolisian.

**Tabel 2.** Jumlah Kendaraan yang mati KIUR pada tahun 2021-2022

No	Tahun	Bulan	Mati Kiur
1	2021	Januari	4
2	2021	Februari	15
3	2021	Maret	39
4	2021	April	46
5	2021	Mei	33
6	2021	Juni	92
7	2021	Juli	9
8	2021	Agustus	8
9	2021	September	31
10	2021	Oktober	42
11	2021	November	6
12	2021	Desember	4
13	2022	Januari	13

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padang, Tahun 2022

Dari Tabel 1.2 dijelaskan masih banyak kendaraan yang Mati uji kelaikan jalan yang menyebabkan hal fatal jika tidak dilakukannya pengujian kelaikan jalan pada kendaraan tersebut. Untuk bulan Februari sampai selanjutnya masih belum dilakukan kegiatan pengawasan akibat sedang melakukan penertiban parkir liar. Yang membuat pengawasan ini belum dilakukan.

## 2. Pengawasan

Paparan yang disebutkan oleh *George R.Terry dan Leslie W.Rue* (2012:55) ada beberapa teknik pengawasan ialah:

### a. Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung ke lapangan untuk melihat apa saja yang memungkinkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan kegiatan. Pada unsur pemantauan ini terkait dari pengawasan yang terlihat dari Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan kegiatan pengawasan untuk penertiban angkutan kota pada trayek 419.

**Gambar 1.** Kegiatan saat dilakukan penertiban angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Padang



Sumber: Dokumentasi dari Dinas Perhubungan, Tahun 2022

Hasil dari temuan bahwasanya kegiatan penertiban waktunya bisa dilakukan kapan saja. Disimpulkan pemantauan yang dilakukan masih kurang dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut. lalu, untuk pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan sudah dilakukan.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh karyawan dan pimpinan yang langsung meninjau ke lapangan untuk melihat kegiatan tersebut (Terry, 2012).

Dari unsur pengawasan, pemeriksaan ini merupakan aspek yang penting. Hasil yang didapatkan bahwa Saat melakukan pengawasan angkutan kota yang dilihat yaitu kartu uji KIUR. Dari pernyataan informan triangulasi dikatakan hanya sekedar memberikan pertanyaan saja dan tidak melihat bukti surat saat melakukan pengecekan berlangsung.

c. Perbaikan

Unsur Perbaikan ini terdiri dari menemukan cara untuk mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi (Terry, 2012). Hambatan yang terjadi saat Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan razia gabungan dengan pihak kepolisian dengan cepat menyebarkan informasi mengenai jaring razia tersebut sehingga membuat angkutan kota tersebut tidak melintas di jalan tersebut. masih banyak oknum sopir angkutan kota yang memberontak dengan tidak mau ditilang saat melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang terjadi masih ada angkutan kota yang menerobos jalan razia saat dilakukannya kegiatan penertiban angkutan kota.

Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan saat mendapatkan hambatan saling koordinasinya dengan pihak kepolisian. Untuk hukuman (punishment) yang diberikan tertuang pada UU No. 22 Tahun 2009 mengenai sanksi administratif terdapat pada pasal 76.

Informan triangulasi yaitu supir angkutan kota yang menyebutkan ada beberapa KTP supir yang hilang dan Dinas Perhubungan hanya melakukan peneguran saja. Dalam hal itu, terdapat perbedaan jawaban yang membuat belum optimal dilakukan pengawasan oleh dinas perhubungan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah di dapat terkait Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota dengan mengacu kepada teori *George C. Edward* dalam Mulyadi (2016:68) memberikan empat implementasi kebijakan. Yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, dalam melakukan pelaksanaannya dikatakan belum optimal karena masih adanya kekurangan yang terjadi pada kegiatan pengawasan saat penertiban angkutan kota. Peneliti menggunakan teori dari paparan ahli *George R.Terry dan Leslie W.Rue* (2012:55) ada beberapa hal yang dilakukan teknik pengawasan di antaranya Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. Untuk pemenuhan indikator tersebut masih dikatakan belum optimal secara keseluruhan, karena masih menemukan beberapa hambatan yang terjadi dan adanya pernyataan yang berbeda oleh informan triangulasi.

Penyebab kurang optimal penerapan indikator dilihat masih ada angkutan yang berusaha melarikan diri karena tidak adanya isolasi yang ketat di lokasi tersebut. Jumlah anggota yang dikirim ke lapangan masih kurang. Kegiatan pengawasan dilakukan tetapi hanya bertanya dan tidak melihat bukti surat uji KIR dan ada yang menjawab tidak sering dilakukan pengawasan. pekerjaan untuk melakukan pengawasan saat penertiban ini dibiarkan begitu saja, seharusnya kegiatan pengawasan saat penertiban angkutan kota ini perlu dilakukan karena mempengaruhi laik jalan kendaraan tersebut.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Alexandri, M. B., & Novel, N. (2019). *Pengelolaan Angkutan Kota Di Indonesia. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 182-189.

- Buamona, M. S., Timboeleng, J., & Karongkong, H. H. (2017). Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate. *Spasial*, 4(3), 82-95.
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher.
- Frinaldi, A. (2016, December). *The Influence of Driver Work Culture and Service Quality on Citizen Satisfaction with Mass Transportation*. In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)* (pp. 450-453). Atlantis Press.
- Frinaldi, A., Embi, M. A., Bila, A., Angriani, S., & Uttami, A. A. (2020, March). *The Effect of Driver Service Quality on Passenger Satisfaction in Public Transportation*. In *International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)* (pp. 51-60). Atlantis Press.
- Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: GavaMedia.
- Mulyadi, Deddy. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T. & Saefullah, K. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
- Terry, G. R. dan L. W. R. (2012). Dasar-Dasar Manajemen (Penerjemah G.A Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.